

FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN GERAKAN RADIKAL DALAM ISLAM

ATU KAROMAH

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten
atukaromah@gmail.com

Abstract

This article focuses on the causes of the radicalism of religions which sometimes perform violence. The modern thinkers believe that religion will fade and loss its role in a society when the society develops to be a modern society. They also believe that the advancement of various sciences will make religion as merely the past inheritance of human being that will be lost along with the development of modernization. Therefore, the social scientist generally believe that 'the death of religion' from human life all over the world is marking the time. The emergence of radicalism of religion in the social and political life of contemporary society is caused by various closely related factors. The radicalism of religion is indicated by the attitude of several adherents who perform denial to human values by performing harshness and terrorism. The adherents of a religion frequently assume that they are the only right ones without any compromise, non-history, and anti-dialogues in understanding the holy texts so that they are labeled as fundamentalists, extremists, radicalists, and so on. There are many factors causing emergence of radicalism of religion such as politics, social, economy, culture and theology.

Key Words: *Radicalism, crisis of modernity, fundamentalism*

Abstrak

Artikel ini fokus pada sebab-sebab kemunculan radikalisme agama yang terkadang melakukan kekerasan. Para pemikir modern percaya bahwa agama akan pudar dan kehilangan perannya di masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat menjadi modern. Mereka meyakini bahwa kemajuan ilmu pengetahuan atau sains dalam berbagai disiplin ilmu akan membuat agama hanya sebagai warisan masa lalu umat manusia yang akan hilang seiring dengan perkembangan modernisasi. Karena itu para ilmuan sosial umumnya percaya bahwa "kematian agama" dari masyarakat dunia hanya tinggal menunggu waktu. Kemunculan radikalisme agama dalam kehidupan sosial dan politik

masyarakat kontemporer disebabkan oleh beragam faktor yang satu sama lain saling berkaitan. Radikalisme agama tersebut ditandai dengan perilaku sebagian pemeluknya yang melakukan tindakan pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan yakni kekerasan dan terorisme. Para pemeluk agama tersebut sering berperilaku ingin benar sendiri, tanpa kompromi, ahistoris dan anti dialog dalam memahami teks-teks suci, sehingga mereka sering mendapat label sebagai kaum fundamentalis, ekstrimis, radikal dan sebagainya. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi kemunculannya, yakni faktor politik, sosial, ekonomi, budaya dan teologi.

Kata Kunci: *Radikalisme, krisis modernitas, fundamentalisme*

Pendahuluan

Salah satu fenomena yang mengejutkan memasuki milenium ketiga ini adalah kebangkitan kembali agama sebagai kekuatan sosial dan politik. Hal tersebut banyak mengagetkan para filosof dan ilmuwan sosial kontemporer. Pemikir abad ke-19 seperti Max Weber, Karl Mark, Emile Durkheim percaya bahwa agama di masyarakat secara perlahan akan pudar dan kehilangan peran pentingnya. Para pemikir masa pencerahan tersebut menyakini bahwa kemajuan ilmu pengetahuan atau sains dalam berbagai disiplin ilmu akan membuat agama hanya sebagai warisan masa lalu umat manusia yang akan hilang seiring dengan perkembangan modernisasi. Karena itu para ilmuwan sosial umumnya percaya bahwa “kematian agama” dari masyarakat dunia hanya tinggal menunggu waktu. Sekularisasi yang ditandai dengan munculnya birokratisasi, rasionalisasi dan urbanisasi merupakan kunci revolusi sejarah yang mentransformasikan masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat industri modern.¹

Kembalinya agama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat dunia tentunya tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satunya ialah apa yang oleh Gilles Kepel disebut dengan krisis modernitas. Modernitas yang telah membawa banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan kemakmuran ekonomi bagi kebanyakan masyarakat Eropa dan Amerika Utara, justru bagi negara-negara dunia menimbulkan banyak paradoks dan kekacauan. Modernisasi bagi sebagian masyarakat dunia berkembang tidak dianggap sebagai berkah tetapi dipandang sebagai

ancaman terhadap nilai-nilai yang mereka anut selama ini, seperti semakin pudarnya institusi keluarga dan ketergantungan ekonomi yang sangat besar ke negara-negara maju. Sehingga yang terjadi proses alienasi (keterasingan) karena merasa tercabut dari akar budaya, pemiskinan yang semakin parah, kesenjangan yang lebar antara yang kaya dan miskin, kehidupan yang semakin individual dan pemerintahan yang otoriter dan despotik.²

Namun demikian kebangkitan agama tidak ditandai dengan menentang misi profetiknya yang humanis untuk mengadakan dialog secara konstruktif dengan agen-agen modernitas untuk membebaskan manusia kontemporer dari ketidakberdayaan akibat derasnya hegemoni kekuasaan para kapitalis dan penguasa yang otoriter. Kebangkitan agama tersebut justru ditandai perilaku sebagian pemeluknya yang melakukan tindakan pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan yakni kekerasan dan terorisme. Para pemeluk agama tersebut sering berperilaku ingin benar sendiri, tanpa kompromi, ahistoris dan anti dialog dalam memahami teks-teks suci. Sehingga mereka sering mendapat label sebagai kaum fundamentalis, ekstrimis, radikal dan sebagainya.

Meskipun munculnya fenomena fundamentalis dalam tradisi keagamaan tidak dimonopoli oleh suatu agama tertentu, tetapi yang paling sering mendapat cap sebagai “fundamentalis” atau panggilan lainnya yang sejenis dari masyarakat internasional adalah kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat muslim. Hal ini memang disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kompleks. Salah satunya adalah persentuhan masyarakat muslim dengan modernitas tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan beberapa benturan dan krisis yang sangat kompleks. Munculnya gerakan-gerakan radikal dalam masyarakat muslim sekarang ini memang tidak bisa dilepaskan dari kemunculan modernitas.

Gerakan fundamentalisme atau radikal dalam Islam sebetulnya bukan hal yang asing. Proses perjalanan sejarah muslim sering dijumpai kelompok-kelompok radikal, baik dalam perilaku maupun pemahaman. Dalam sejarah Islam dikenal kelompok Khawārij dan Assain sebagai kelompok yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap tidak sepaham dengannya.

Namun demikian, fundamentalisme di millenium baru ini berbeda dengan gerakan radikal yang tercatat dalam sejarah. Gerakan radikalisme abad ini muncul sebagai reaksi terhadap kebudayaan sekular ilmiah yang muncul pertama kali di Barat dan kemudian

merambah ke berbagai penjuru dunia. Barat telah mengembangkan tipe peradaban yang sangat berbeda dengan peradaban sebelumnya, sehingga reaksi keagamaan terhadapnya pun sangat unik.

Pada tulisan ini akan diekplorasi tentang faktor-faktor yang memberikan dorongan terhadap munculnya gerakan radikal dalam Islam. Munculnya gerakan tersebut memang sesuatu yang kompleks, maka pembahasannya pun akan dibatasi pada kajian tentang pengaruh politik, ekonomi, sosial-budaya dan pemahaman keagamaan. Kajiannya pun hanya akan terfokus pada kasus Indonesia, meskipun akan diulas pula secara singkat gerakan di negara lainnya apabila dipandang ada keterkaitan.

Faktor Politik

Munculnya gerakan keagamaan yang radikal dalam umat Islam Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik di dalam negeri maupun dunia internasional. Sebenarnya gerakan “Islam radikal” di Indonesia tidak hanya muncul sekarang ini saja, gerakan yang serupa telah ada sebelumnya seperti DI/TII. Gerakan DI/TII itu memiliki ideologis-politis untuk mendirikan negara Islam. Sebab ideologi dan bentuk negara-bangsa yang ada dianggap tidak akan bisa memenuhi aspirasi atau harapan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila Indonesia secara formal menjadi sebuah negara yang berlandaskan pada ideologi Islam, bukan Pancasila yang dianggap sebagai ideologi sekuler.

Pada awal-awal kemerdekaan tuntutan untuk mengganti dasar negara Pancasila merupakan isu utama dalam gerakan Islam radikal di Indonesia. Hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari pandangan bahwa ada pertentangan ideologis antara sistem politik Barat modern dengan sistem politik Islam.³ Sistem politik Barat yang menekankan pada kedaulatan rakyat dianggap bertentangan dengan sistem politik Islam yang menekankan pada kedaulatan Tuhan. Loyalitas kaum nasionalis didasari pada gagasan bahwa legitimasi negara berakar pada kehendak rakyat yang tidak terkait dengan doktrin agama manapun. Karena itu dalam sistem politik Barat, kekuasaan politik itu harus dipisahkan dari agama. Agama tidak boleh menjadi acuan utama dalam menentukan nilai atau norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai atau norma dalam negara diatur atas pertimbangan riil kemaslahatan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan berdasarkan kepada tradisi atau pemahaman dari kelompok agama

tertentu. Nilai-nilai agama hanya boleh menjadi sistem keyakinan individu terhadap Tuhannya.

Sedangkan dalam Islam, menurut kelompok radikal ini, tidak memisahkan antara urusan politik dan agama. Dalam Islam, menurutnya, agama dan politik itu adalah menyatu. Maka semboyan yang mereka usung adalah “*al-Islām huwa ad-dīn wa ad-dawlah*” (Islam adalah agama dan negara). Karena itu, kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat tetapi ada “tangan” Tuhan. Karena itu yang menjadikan acuan utama dalam bernegara adalah memahami kehendak Tuhan yang tercantum dalam kitab suci dalam hal ini al-Qur‘ān dan Hadīst Nabi Saw. Oleh karenanya yang jadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum atau norma adalah teks-teks kitab suci, terutama makna yang secara literal dianggap telah jelas (*qath’i*). Pertimbangan kemaslahatan rakyat dianggap terlalu subyektif, karena belum tentu keinginan rakyat itu sesuai dengan bunyi teks kitab suci. Pertimbangan kemaslahatan akan dijadikan pertimbangan apabila dianggap tidak bertentangan dengan bunyi teks kitab suci. Maka bagi golongan ini demokrasi itu bertentangan dengan Islam.⁴

Salah satu kelompok gerakan Islam radikal di Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini bercita-cita menegakkan kembali Khalifah Islāmiyyah yang telah runtuh seratus tahun yang lalu.⁵ Karena itu kelompok Islam radikal ini menolak mengikuti pemilu tahun 2004 yang lalu. Mereka berpandangan bahwa pemilu adalah instrumen demokrasi yang hukumnya haram dalam ajaran Islam. Menurut mereka demokrasi tidak menjamin tegaknya penerapan syariah di bumi Indonesia. Bagi mereka, demokrasi bukan hanya musyawarah, perbedaan pendapat dan pemilu. “Itu pemahaman yang sangat dangkal tentang demokrasi”, kata Muhammad al-Khaththah, Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia 2004-2006.⁶

Menurut HTI ada beberapa alasan mengapa demokrasi itu bertentangan dengan Islam.⁷ Pertama, demokrasi bukan sistem pemerintahan berdasarkan wahyu Allah SWT, melainkan hanya berasal dari akal pikiran manusia. Itu bertentangan dengan sistem Islam yang pasti berasal dari Allah. Kedua, demokrasi berdasarkan akidah sekular yang memisahkan agama dengan negara. Sekularisme, menurutnya, bermula dari kompromi gereja dengan kaum intelektual yang menentang otoritas gereja di Eropa pada abad pertengahan. Maka, sekularisme yang menjadi dasar demokrasi bertentangan dengan Islam. Ketiga, demokrasi berdasarkan dua hal, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan. Ini berarti, menurut HTI,

memberi hak pada rakyat mencabut suatu hukum bila memang dikehendaki. Menurutnya, dalam Islam, kedaulatan ada di tangan *syara'*, bukan pada rakyat atau umat. Keempat, salah satu mekanisme pengambilan keputusan dalam demokrasi adalah dengan menyandarkan pada keputusan mayoritas. Padahal dalam Islam, menurut kelompok ini, tidak semua urusan bisa diselesaikan lewat suara terbanyak. Masalah-masalah yang terkait dengan hukum tidak bersandar pada pendapat mayoritas, tapi berdasarkan *nash-nash syara'*. Kelima, demokrasi berbeda dengan Islam dalam membahas kebebasan individu berkaitan dengan kebebasan beragama, berpendapat, tingkah laku, dan kepemilikan. Demokrasi membebaskan orang memeluk agama apapun, dan bebas melepaskan agamanya kapan pun ia mau. Sedangkan Islam memang tidak memaksa non-muslim masuk Islam. Tetapi, menurutnya, Islam tidak membolehkan seorang muslim mengganti akidah dengan berpindah agama. Karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian pula dalam hal kebebasan berpendapat, demokrasi memberikan keluasaan kepada siapa saja untuk berpendapat semaunya dengan cara apa pun. Demokrasi juga memberikan kebebasan individu untuk bertingkah laku terlepas dari segala macam nilai. Sedangkan, menurut kelompok ini, Islam membatasi setiap muslim dalam perkataan dan perbuatannya, kecuali yang dibolehkan oleh syari'ah.

Pemikiran sistem politik Barat sekuler memang masuk dan diterapkan di negara-negara muslim yang baru merdeka pada umumnya dilakukan bukan oleh para tokoh agama. Mereka yang membawa gagasan sistem politik Barat adalah elite kota yang mengenyam pendidikan model Eropa. Karena itu pada umumnya mereka tidak memiliki pengetahuan agama Islam yang memadai. Akibatnya, ketika muncul kesadaran untuk menentukan nasib sendiri dan meraih kemerdekaan, maka para elit terdidik kota tersebut yang memformulasikan sistem politik bagi negerinya, sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.⁸ Karena itu pada umumnya mereka mengadopsi sistem politik Barat sekuler yang dianggap lebih mampu membawa kemajuan masyarakat. Gagasan tentang pemisahan agama dan politik merupakan upaya untuk menyingkirkan rintangan yang diciptakan loyalitas agama untuk tujuan politik negara. Para kaum nasionalis sekuler menciptakan sistem birokrasi yang diambil dari para tenaga trampil yang terdidik secara Barat bukan dari kalangan agamawan. Implikasinya adalah pudarnya kekuasaan politik yang didasarkan pada loyalitas tradisi agama.⁹ Peran para ulama pun

akhirnya tersingkir dari sistem politik di negara-negara mayoritas muslim. Pada abad pertengahan, ulama memiliki peran penting dalam sistem politik dinasti Abbasiyah dan Usmaniyah, yakni sebagai *qādhi* atau penasihat sultan atau raja. Tetapi kini peran mereka hanya sebatas pendidik atau juru dakwah. Tidak memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan negara.

Masalahnya, dalam negara yang menganut sistem politik yang menganut paham nasionalisme sekular, warga negara diharuskan—bahwa terkadang dengan pemaksaan—untuk mengalihkan loyalitas tertingginya kepada negara-bangsa. Hal ini berarti telah menggoyang struktur sosial yang ada selama ini yang berpaku pada loyalitas keagamaan sebagai titik puncak loyalitas individu. Ini berarti perubahan dari budaya yang sakral ke budaya sekular. Pada level sosial, perubahan tersebut berarti menundukkan kesetiaan kepada agama di bawah level kesetiaan kepada bangsa-negara. Ini juga berarti paham nasionalisme sekular berada “di atas agama”. Masyarakat dapat keluar dari kesetiannya terhadap suatu agama jika ia menghendaki. Orang yang tetap teguh mempertahankan kesetiaan tertingginya terhadap agama dari pada kepada negara-bangsanya dipandang sebagai orang yang memiliki “pandangan keagamaan yang picik”.¹⁰

Perlakuan yang tidak simpatik dalam memandang agama dan ketidakmampuan untuk mengadopsi “agama” dalam sistem nasionalisme sekular, sering menimbulkan perasaan tidak nyaman banyak kalangan para ulama Islam. Sehingga potensi untuk melakukan perlawanan terhadap sistem kenegaraan sekular merupakan kekuatan laten yang dimiliki agama untuk kembali memainkan peran tradisional dalam bidang politik dan sosial.

Agama dan paham nasionalisme sekular merupakan ideologi orde. Kedua-duanya dapat mengklaim sebagai penjamin keteraturan dalam masyarakat. Kedua-duanya dapat mengklaim sebagai otoritas tertinggi bagi tatanan sosial. Maka keduanya adalah saingan yang potensial. Masing-masing mengklaim membawa tingkat kekuatan yang luar biasa karena yang terkandung di dalamnya adalah hak untuk memberi pahala moral bagi kehidupan dan hukuman, termasuk hak untuk membunuh. Ketika agama dan nasionalisme sekular masing-masing merumuskan peran dirinya, maka reduksi peran yang lainnya menjadi tidak terhindarkan, sehingga peran sosial yang dimiliki lawannya berifat periferial.

Dalam sejarah perpolitikan Islam bahkan masyarakat dunia, agama sering kali mengingkari otoritas moral bagi politisi-politisi

sekular, tetapi di abad sekarang justru sebaliknya. Otoritas-otoritas politik berusaha memonopoli otoritas publik untuk menegakkan sanksi dan mereduksi otoritas agama hanya dalam wilayah individu. Sebenarnya hal itu telah cukup berlangsung lama, tetapi biasanya otoritas politik itu berkolusi dengan otoritas religius, tidak saling berlawanan. Namun kini otoritas religius benar-benar terpinggirkan dalam sistem politik negara bangsa. Hal tersebut yang pada akhirnya mendorong “fundamentalis agama” untuk berusaha menegakkan atau merebut kembali otoritas yang pernah dimilikinya. Karena itu, ide tentang mendirikan negara Islam menjadi hal laten yang tidak mudah dihapus dari kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia.¹¹

Untuk meredakan ketegangan dengan para otoritas religius, pemerintah Orde Baru mengakomodasi beberapa aspirasi keagamaan secara selektif. Sikap itu diambil bukan tanpa alasan. Memasukkan unsur-unsur agama ke dalam nasionalisme akan mengurangi para tokoh agama Islam untuk membangun basis kekuatan anti pemerintah yang berkuasa. Hal itu juga memberikan legitimasi religius bagi negara dan membantu memberi citra kepada nasionalisme tidak seluruhnya sekuler tetapi ada pancaran religiusnya. Negara di masa pemerintahan Orde Baru berusaha untuk membuat perundang-undangan yang dianggap sebagai sikap akomodatif tuntutan umat Islam, seperti di sahkanya Undang-undang Peradilan Agama tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dibolehkannya para siswa sekolah menengah untuk memakai jilbab, terbentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (Bazis) tahun 1991, dan sebagainya.

Namun demikian, sikap akomodasi negara terhadap beberapa ketentuan syariat Islam tersebut belum sepenuhnya memuaskan bagi kelompok Islam radikal. Maka, seiring dengan arus deras reformasi, banyak bermunculan gerakan Islam yang orientasinya adalah penegakan syariat Islam. Secara politik, mereka memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai *entry point* pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Sebab dalam pandangan mereka, negara belum banyak menyalurkan aspirasi mereka secara luas terhadap orientasi penegakan syariat Islam. Dalam pandangan mereka, negara masih dikuasai oleh kekuatan sekuler yang mau meminggirkan peran Islam dalam urusan-urusan publik.

Faktor Ekonomi

Selain karena faktor politik, yakni adanya pertentangan dalam menentukan dasar negara dan dasar moral politik, radikalisme dalam

Islam juga disebabkan oleh problem ekonomi yang menimpa umat Islam. Dewasa ini dunia Islam merupakan kawasan bumi yang paling terbelakang dan tertinggal dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibandingkan dengan kawasan lain yang menganut agama-agama besar lainnya. Negara-negara Islam jauh tertinggal oleh negara-negara Eropa Utara, Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru yang penduduknya mayoritas beragama Protestan; oleh Eropa Selatan dan Amerika selatan yang Katolik Romawi; oleh Eropa Timur yang Katolik Ortodoks; oleh Israel yang Yahudi; oleh India yang Hindu; oleh Cina, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura yang Konfusianis dan oleh Jepang dan Thailand yang Budhis. Praktis tidak ada satu agama besar yang ada di dunia ini yang lebih rendah kemajuan ilmu pengetahuan dan kemakmuran ekonominya dari pada umat Islam.¹²

Berdasarkan hal tersebut, negara-negara yang mayoritas muslim sangat tergantung pada negara-negara lain terutama negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika yang notabene penduduknya mayoritas non-muslim. Seruan pembangunan dan bantuan negara-negara maju, tidak membuat negara-negara muslim mencapai kemakmuran, tetapi justru menambah ketergantungan secara ekonomi kepada negara-negara donor.

Pengalaman negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa bantuan asing pada tingkat pemerintah, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, pada akhirnya lebih melayani kepentingan pihak donor dari pada pihak yang menerima. Para penerima bantuan ini biasanya diikat dengan kontrak agar membelanjakan sebagian besar dana bantuan asing ini untuk membeli jasa dan perlengkapan teknis dari pihak yang memberi dana bantuan (donor). Ketergantungan mereka pada pihak donor menjadi semakin besar karena adanya kepentingan untuk membayar, tuntutan baru terhadap jasa dan perlengkapan. Sehingga adanya pembangunan ekonomi tidak seimbang dengan akibat yang harus ditanggung oleh bantuan asing itu sendiri.¹³

Penanaman modal asing oleh korporasi multinasional dan agen-agen privat lainnya di negara-negara dunia ketiga, lebih memberi manfaat kepada investor dengan mengambil keuntungan dari tenaga buruh yang murah, pasar konsumen yang telah tersedia dan tidak adanya peraturan yang ketat dalam pembuangan limbah industri. Dengan demikian, meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan tersebut bukanlah pertumbuhan ekonomi yang

sesungguhnya yang dapat dinikmati oleh semua warga masyarakat negara-negara dunia ketiga. Pertumbuhan ekonomi tersebut justru menarik negara-negara miskin ke arah yang dikehendaki oleh negara-negara maju, yakni menciptakan ketergantungan. Akhirnya pertumbuhan tersebut tidak memberi nilai guna kepada mayoritas penduduk. Ketergantungan yang kuat terhadap bantuan asing dan investasi asing menimbulkan problem yang akut yakni tidak membantu menghilangkan jurang antara negara miskin dengan negara-negara kaya, tetapi justru lebih memperdalam jurang tersebut.

Meskipun sebagian negara-negara muslim adalah penghasil minyak bumi, tetapi kekayaan minyak bumi itu sering tidak dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Negara-negara Muslim di Timur Tengah pada umumnya adalah pengeksport minyak bumi ke mancanegara. Namun demikian hasil minyak bumi itu hanya dinikmati oleh para elit penguasa yang otoriter. Mereka hidup di istana-istana mewah atau memiliki villa mewah di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sedangkan mayoritas rakyat mereka hidup dalam kemiskinan.

Hal yang harus disadari, bahwa para operator atau pengelola minyak bumi itu bukanlah perusahaan-perusahaan milik pribumi, tetapi perusahaan multinasional yang berpusat di Eropa dan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan besar, seperti Exxon Mobile dan Shell adalah yang banyak mengeksplorasi dan menyedot minyak bumi dari negara-negara muslim untuk memenuhi kebutuhan industri di negara-negara Barat. Keuntungan terbesar jelas dinikmati oleh perusahaan-perusahaan tersebut daripada yang didapatkan oleh warga masyarakat yang ada di dekat pengelolaan minyak bumi tersebut. Warga yang ada di sekitarnya hanya menikmati gaji yang rendah. Tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan, polusi udara dan limbah industri yang menimpa mereka akibat eksploitasi terhadap kekayaan bumi mereka.

Penetrasi ekonomi kapitalisme global tidak hanya pada perindustrian dan perusahaan besar tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi real yang dikuasai oleh para pedagang kecil. Yang paling nyata adalah pembukaan makanan cepat saji, seperti Kentucky Fried Chicken (KFC), McDonald dan sebagainya. Begitu pula mereka menguasai dalam penjualan retail pakaian dan garmen melalui pembukaan toserba dan mall. Hal tersebut jelas akan mematikan para pedagang kecil yang umumnya masyarakat kelas bawah. Pada akhirnya, pembukaan perusahaan-perusahaan itu hanya menguntungkan sekelompok orang para elit penguasa, sedangkan masyarakat bawah telah terjadi proses pemiskinan yang semakin parah.¹⁴

Hal itu mengakibatkan rasa tidak puas dan memendam rasa kecewa di kalangan tokoh-tokoh agama yang sudah terpinggirkan secara politik. Mereka menjadi sangat sensitif pada isu-isu ekonomi yang berkaitan dengan kapitalisme dan liberalisme. Pada umumnya, para agamawan mencurigai bahwa proses kemiskinan yang melanda umat Islam itu disebabkan oleh ekonomi global yang tidak adil yang dimainkan oleh para pemilik modal besar dan pendukung pasar bebas. Karena itu sikap-sikap anti Barat sangat nyaring didengungkan di negara-negara yang ekonominya sudah tergantung pada sistem ekonomi global.

Bagi kaum yang terpelajar, untuk menepis rasa ketergantungan ekonomi terhadap sistem kapitalisme global itu, maka muncullah seruan-seruan mengakhiri mengikuti pembangunan model negara-negara Barat. Para agamawan menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat muslim untuk membuat kebijakan pembangunan yang independen, yang bersandar kepada kemampuan diri sendiri, sumber daya dan cara-cara kultural mereka sendiri. Adanya seruan untuk mengembangkan ekonomi Islam, membuat perbankan syariah, asuransi syariah dan yang lainnya merupakan upaya-upaya untuk melepaskan negara-negara muslim dari ketergantungan terhadap ekonomi Barat yang dianggap tidak adil, karena hanya menguntungkan pihak mereka dan banyak merugikan negara-negara muslim.

Faktor Sosial-Budaya

Pengadopsian sistem politik dan hegemoni ekonomi Barat di negara-negara muslim pada akhirnya juga mempengaruhi nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat muslim secara luas. Adanya penentangan modernisasi oleh para ulama, bukan karena mereka menolak hasil-hasil industri, seperti mobil dan telepon yang dihasilkan oleh negara-negara Barat, tetapi mereka mencurigai akan masuknya nilai-nilai budaya Eropa ke masyarakat muslim melalui proses westernisasi.

Sebenarnya dalam proses modernisasi perubahan sosial dan budaya merupakan hal yang tidak terelakan. Sebab, pengalaman yang serupa telah dirasakan oleh masyarakat Eropa. Peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri akan mempengaruhi struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Modernisasi pun menuntut adanya perubahan dan struktur sosial dan nilai budaya. Hal ini diakibatkan adanya perubahan dalam tingkat pendidikan, sistem kerja dan birokrasi pemerintahan.

Ketika proses modernisasi itu diperkenalkan ke dalam dunia Islam, maka perubahan sosial-budaya menjadi tidak terelakan. Struktur sosial pun banyak berubah. Peran tokoh agama semakin pudar, tidak sekuat sebelumnya karena ada kekuatan birokrasi pemerintahan. Masyarakat pun banyak yang lebih terpelajar karena adanya pendidikan yang diselenggarakan secara massal akibat adanya kebutuhan untuk mengisi pekerjaan dalam industri dan pemerintahan yang membutuhkan *skill* yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan di sektor pertanian. Pusat-pusat informasi yang menyebar secara luas melalui televisi, surat kabar, buku-buku dan internet membuat semua orang memiliki akses yang luas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan tidak lagi terbatas melalui para ulama atau ilmuwan tetapi dari sarana-sarana ilmu pengetahuan yang sudah menyebar tersebut. Hal-hal tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi sistem nilai yang dianut masyarakat.

Perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri itu digambarkan oleh Karen Armstrong sebagai perubahan dari mitos ke logos.¹⁵ Mitos dan logos merupakan dua cara manusia dalam memahami kehidupannya di dunia ini. Mitos dan logos adalah cara berpikir, berbicara dan memperoleh pengetahuan. Masyarakat pra industri atau agraris lebih mengutamakan mitos daripada logos. Mitos dianggap utama karena berkaitan dengan sesuatu yang abadi, universal dan selalu ada dalam eksistensi kita. Mitos berbicara tentang asal-usul kehidupan, dasar kebudayaan dan tingkatan terdalam pikiran manusia. Mitos berurusan dengan makna hidup dan tidak berurusan dengan masalah-masalah praktis. Manusia akan mudah jatuh ke dalam keputusan jika mereka tidak menemukan makna dalam hidup mereka. Mitos tidak bisa ditunjukkan dengan bukti-bukti rasional. Manfaatnya lebih bersifat intuitif, seperti seni, musik dan puisi. Mitos hanya menjadi kenyataan jika ia dipraktikkan dalam ritual dan upacara-upacara keagamaan yang dapat menimbulkan rasa estetik kepada para pengikutnya dan menimbulkan nuansa suci sehingga mereka mampu mendapatkan tingkat eksistensi yang lebih dalam.

Sedangkan manusia modern lebih mengutamakan logos daripada mitos. Logos adalah pemikiran rasional, pragmatis dan ilmiah yang memungkinkan manusia berfungsi dengan baik di dunia. Tidak seperti mitos, agar bisa efektif, logos harus berkaitan persis dengan fakta-fakta empiris atau bersesuaian dengan realitas eksternal. Kita menggunakan penalaran logis dan diskursif jika kita ingin mewujudkan sesuatu, menuntaskan pekerjaan, atau membujuk orang lain melakukan

tindakan yang sama. Logos bersifat praktis. Tidak seperti mitos yang merujuk ke belakang pada awal mula dan fondasinya, logos terus melompat ke depan dan berusaha menemukan hal baru; mengelaborasi tradisi lama, memperoleh kendali yang lebih besar terhadap lingkungan, menemukan sesuatu yang segar dan menciptakan sesuatu yang baru.

Pada abad ke-18, orang-orang Eropa dan Amerika yang berhasil mengembangkan sains dan teknologi percaya bahwa logos adalah satu-satunya sarana mencapai kebenaran. Mereka menganggap mitos sebagai kesalahan dan takhayul belaka. Mereka berusaha memerangi agama dan menyingkirkan para pendeta dari ruang publik karena telah mengajarkan kesalahan dan kebohongan kepada masyarakat. Maka kemunculan fundamentalisme agama pada awal millenium ketiga ini merupakan tindakan dari “balas dendam Tuhan” terhadap para pendukung modernisasi yang dulu memerangi agama.¹⁶

Kemunculan gerakan fundamentalisme dalam Islam pun tidak terlepas dari usaha untuk mengadakan perlawanan secara budaya terhadap penetrasi dan hegemoni kebudayaan Barat yang sekuler. Penetrasi budaya Barat telah membuat kebudayaan masyarakat muslim menjadi berantakan, sehingga menimbulkan alienasi di sebagian masyarakat muslim. Sebagian masyarakat muslim merasa hidup bukan di kebudayaan yang mereka ciptakan sendiri tetapi yang dipaksakan dari luar. Mereka merasa tercabut dari akar kebudayaan mereka sendiri. Mereka hidup di dunia yang asing. Hal ini yang mendorong orang mencari nilai-nilai yang otentik dalam Islam, agar bisa hidup di dunia yang semakin keras persaingannya baik secara ekonomi maupun budaya.¹⁷

Salah satu isu sosial yang sering dikeluhkan para ulama dan aktivis gerakan Islam adalah makin permisifnya generasi muslim kontemporer terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, karena itu mereka sangat konsen dalam hal pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas pra nikah antara laki-laki dan perempuan, dan praktek prostitusi. Hal-hal tersebut dipandang sebagai usaha untuk menjauhkan nilai-nilai Islam dari generasi muda muslim. Maka *counter* budaya yang dilakukan adalah salah satunya gerakan jilbab. Jilbab menjadi perhatian utama untuk kalangan aktivis Islam dan dijadikan sebagai simbol kesalehan bagi seorang muslim. Jilbab juga bermakna perlawanan terhadap hegemoni kebudayaan Barat yang melanda umat Islam.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, mereka pada umumnya sangat curiga bahkan menolak setiap usaha yang dilakukan para aktivis gender. Gerakan *mainstreaming gender* dipandang sebagai usaha Barat untuk menghancurkan nilai-nilai keluarga dalam Islam. Usaha-usaha kesetaraan gender yang dilakukan para aktivis gender muslim dipandang oleh kaum fundamentalis Islam sebagai usaha menyusupkan nilai-nilai Barat ke dalam kehidupan keluarga muslim yang pada akhirnya akan menghancurkan generasi muda Islam.¹⁹

Isu sosial lainnya yang sering menjadi perhatian para aktivis gerakan Islam radikal karena dianggap banyak melemahkan nilai-nilai Islam di masyarakat adalah praktek perjudian, mabuk minuman keras dan narkoba. Mereka sangat konsen dalam hal itu, sehingga mereka sering mengadakan razia ilegal terhadap tempat-tempat hiburan yang dipandang sebagai tempat maksiat. Di Indonesia, kelompok yang menamakan dirinya Front Pembela Islam (FPI), merupakan yang paling sering mengadakan razia terhadap tempat-tempat hiburan yang dianggap sarang kemaksiatan, karena dianggap telah menodai dan mengotori masyarakat muslim.²⁰

Kegiatan FPI tidak terbatas pada pendekatan aksi dan operasi lapangan yang anarkis, sebagaimana yang beberapa kali mereka lakukan, tapi juga melakukan kegiatan yang bersifat diplomatis, sosial dan intelektual. Karena itu FPI menggelar diskusi serta mengirim beberapa orang utusannya ke DPR, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan di DKI Jakarta, FPI beberapa kali di undang oleh gubernur untuk membicarakan peraturan tentang hiburan selama bulan Ramadhan. FPI pun melakukan tekanan kepada Pemda DKI dan DPRD untuk membuat Perda Anti Maksiat, demikian pula hal serupa dilakukan di daerah Tangerang.

Maraknya kemaksiatan berupa minuman keras, narkoba, perjudian dan pelacuran, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan, membuat FPI berusaha keras agar ada Undang-undang Anti Maksiat bisa segera terwujud. Dalam draf Peraturan Daerah yang diusulkan FPI ke Pemda DKI Jakarta, disebutkan beberapa hal penting.²¹ *Pertama*, bahwa segenap umat Islam wajib menjaga dan melindungi norma-norma agama dan nilai-nilai kultur budaya masyarakat yang agamis. *Kedua*, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari segala bentuk perusakan moral dan penghancuran tatanan kehidupan masyarakat. *Ketiga*, perlu segera langkah-langkah kongkret dalam mengatasi kemaksiatan yang tingkat penyebarannya serta efek negatifnya telah mencapai titik yang mengawatirkan.

Keempat, menuntut DPRD DKI Jakarta bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur secara tuntas soal maksiat.

Faktor Pemahaman Keagamaan (Teologi)

Munculnya gerakan radikal dalam komunitas agama jelas diinspirasi atau memiliki landasan dalam ajaran agama yang dijadikan legitimasi untuk mengabsahkan tindakan-tindakan yang dilakukannya. Namun pertanyaan yang muncul, kenapa memilih agama sebagai sumber gerakan dan tidak mengambil inspirasi dari sumber lain? Pertanyaan itu semakin sulit menemukan jawabannya apabila tindakan-tindakan para kaum fundamentalis itu mengarah kepada tindakan kekerasan seperti pembunuhan atau terorisme? Kenapa agama yang mengajarkan tentang kebaikan justru pada faktanya mentoleransi bahkan melegitimasi tindakan suatu kekerasan?

Jawaban apologetik kaum beragama adalah bahwa agama pada dasarnya tidak memerintahkan untuk melakukan kekerasan kepada sesama, namun pemeluknya, baik secara individu maupun kolektif, yang membelokkan makna pesan Allah dari yang sesungguhnya. Namun demikian dalam kenyataan, sejarah perkembangan agama tidak pernah lepas dari unsur-unsur kekerasan yang dilakukan oleh para pemeluknya.

Bila kita mempelajari sejarah agama-agama besar, maka kita akan menemukan jejak yang sama. Pada agama-agama tersebut akan ditemukan ritualisasi kekerasan dalam bentuk pengorbanan sebagai bentuk kebaikan, penggunaan kekerasan untuk mencapai kebaikan tertinggi dan kebutuhan kekerasan untuk mempertahankan iman. Semua hal itu dianggap sebagai usaha untuk mencapai perdamaian tertinggi. Karena itu melakukan kekerasan untuk mencapai itu merupakan tugas suci yang diperintahkan agama.²²

Tidak bisa dipungkiri memang dalam setiap agama ada ajaran-ajaran yang potensial akan ditafsirkan oleh pemeluknya untuk melakukan kekerasan, terutama kepada pihak-pihak yang menentang atau menolak mengakui kebenarannya. Tidak terkecuali dalam hal ini Islam. Apabila kita membuka al-Qur'an atau Hadits Nabi maka kita akan menemukan beberapa ayat yang potensial ditafsirkan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang dianggap menyerang atau menolak mengikuti ajaran Islam.

Ayat al-Qur'an surat al-Baqarah: 110 yang menyatakan bahwa sebagai seorang umat terbaik, kaum muslimin diperintahkan

melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ayat tersebut sering dipakai oleh FPI untuk legitimasi dalam melakukan razia di tempat-tempat hiburan dengan alasan memberantas kemungkaran. Demikian pula Imam Samudra, terdakwa mati Bom Bali I, bahwa tindakannya melakukan teror itu adalah memiliki dasar dari Kitab Suci. Imam Samudra mengaku bahwa tindakannya itu adalah bagian dari tugas suci untuk memerangi orang kafir yang telah berbuat tidak adil kepada kaum muslimin. Ia menjustifikasi perbuatannya tersebut dengan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah: 190.²³

Menurut Charles Kimball bahwa agama akan menjadi bencana apabila pemeluknya itu; *pertama*, mengklaim kebenaran agamanya sebagai kebenaran mutlak dan dipakai untuk membenarkan dan mendukung apa saja yang ia lakukan, sedangkan penafsiran lain yang tidak sependapat dikatakan salah; *kedua*, adanya kepatuhan buta terhadap tokoh-tokoh agama, sehingga ia tidak berpikir kritis terhadap perilaku pemimpin agamanya tersebut; *ketiga*, merindukan zaman ideal, lalu bertekad merealisasikan zaman tersebut ke dalam zaman sekarang; *keempat*, membenarkan segala cara untuk meraih tujuannya; *kelima*, menyerukan perang suci terhadap orang-orang yang menolak atau tidak setuju dengan pendapatnya.²⁴

Namun demikian, sebenarnya agama akan dijadikan landasan atau legitimasi untuk melakukan suatu tindakan, baik kekerasan atau bukan, apabila dalam pemikiran pemeluknya itu merasa tidak ada jalan lain lagi. Dengan demikian agama dijadikan landasan atau legitimasi perbuatan pemeluknya apabila dirasakan menemui jalan buntu dan tidak berdaya dalam menghadapi berbagai tekan yang menimpa dirinya.

Menurut Mark Juergensmeyer, sebetulnya ada tahapan-tahapan tentang suatu tindakan kekerasan akan disandarkan kepada agama. Pada awal suatu tindakan untuk mengubah sesuatu itu bersifat biasa atau profan namun karena ada tekanan-tekanan yang dirasa begitu hebat, maka tindakan itu biasanya mencari legitimasi agama sebagai pemberi kekuatan kosmis.²⁵ Tahapan-tahapan itu ialah; *pertama*, apabila ada perasaan atau pemikiran di benak para pemeluk agama bahwa situasi yang dihadapinya begitu besar dan berat dan menganggapnya sebagai suatu tanda suatu dunia yang amburadul atau serba salah. *Kedua*, apabila mereka melihat bahwa pemecahan terhadap situasi yang dihadapi tidak mungkin dilakukan dengan jalur atau saluran-saluran biasa. Keputusan terhadap dunia sekitar yang mereka alami tersebut sebagai sesuatu hal yang potensial bagi kegagalan personal dan

ketidakbermaknaaan eksistensial. *Ketiga*, setelah mereka mengalami keputusan dan melihat situasi yang tanpa harapan, maka mereka melihat agama sebagai pemberi solusi yakni perang kosmis, bahwa perjuangannya itu memiliki dimensi-dimensi ilahiah atau sakral, Tuhan akan bersama mereka dan mereka akan meraih kemenangan. Sedangkan lawan-lawan mereka menjelam menjadi setan dan dianggap sebagai “kekuatan-kekuatan jahat” yang harus dihancurkan. *Keempat*, tahapan terakhir, tontonan aksi-aksi yang secara simbolis menunjukkan kedalaman perjuangan dan kekuatan. Mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Hal itu mereka lakukan sebagai suatu upaya untuk menunjukkan kepada orang atau kelompok yang dianggap lawannya bahwa mereka memiliki komitmen yang dalam dan kekuatan yang besar untuk menghadapi atau menghancurkan lawan. Mereka ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak selemah yang dikira.

Penutup

Munculnya gerakan radikal dalam Islam dewasa ini memiliki faktor yang sangat kompleks. Dari uraian di atas bahwa pertentangan ideologi politik, perebutan ekonomi, hegemoni budaya dan doktrin-doktrin agama terjalin begitu erat, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan satu dengan lainnya. Sangat sulit untuk ditentukan mana faktor yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena radikalisme Islam dewasa ini merupakan cermin dari kompleksitas peradaban dunia sekarang. Bagi sebagian orang, bahwa kehidupan ini terlalu berat untuk dijalani, sehingga mereka mengambil jalan pintas dari kebuntuan itu dengan memahami agama secara literal. Mereka meyakini bahwa pemahaman agama yang sederhana itu merupakan jalan keluar dari kemelut kehidupan yang sangat rumit ini.

Berdasarkan hal itu, maka solusi dalam menangani fenomena radikalisme ini jelas tidak sederhana. Penanganan terhadap problem ini tidak cukup dengan mengajak mereka berdialog dalam soal agama atau melalui jalur hukum, tetapi juga harus ada tindakan-tindakan kongkret dengan menghilangkan apa yang mereka rasakan atas ketidakadilan dalam kehidupan di dunia ini. Maka solusi dalam bidang politik dan budaya juga merupakan sesuatu yang tidak terelakan untuk meminimalisir berkembangnya aksi-aksi radikalisme yang di dasarkan kepada agama.

Catatan akhir

¹ Pippa Norris dan Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*, (Cambridge University Press, 2004), h. 3.

² Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, (Jakarta: Serambi, 2001), h. x-xiii.

³ Yang dimaksud dengan sistem politik Islam di sini adalah pemikiran-pemikiran politik para aktivis Islam pada awal abad ke-20 seperti yang dikemukakan oleh al-Maududi, Hasan al-Banna dan yang lainnya, yang menyakini ada sistem politik yang khas Islam, yang berbeda dengan sistem politik yang dikembangkan oleh negara-negara Barat modern.

⁴ Perdebatan tentang hubungan negara dan agama di Indonesia dari awal kemerdekaan samapai runtuhnya Orde Baru lihat Faisal Ismail, *Islam dan Pancasila: Indonesia Politics 1945-1995*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2001).

⁵ Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1977), seorang pejuang Palestina, pada tahun 1952 di al-Quds, Palestina. Kemudian kelompok ini menyebar ke banyak negara. Bahkan markas pusat sekarang berada di London, Inggris. Gerakan ini memasuki Indonesia sekitar tahun 1980. Lebih jauh lihat hasil penelitian PPIM UIN Jakarta, "Menuju Khilafah Islamiyah: Gerakan Hizbuttahrir Indonesia" dalam Jamhari dan Jajang Jahroni (eds.), *Gerakan Salaf Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 161-203.

⁶ "Pengusung Syariah di Jalur Tengah" *Gatra: Edisi Khusus*, No. 1-2 tahun XI, 27 November 2005, h. 120.

⁷ "Pengusung Syariah di Jalur Tengah", h. 121.

⁸ Dalam kasus Indonesia, para pendiri bangsa (*founding father*) adalah mereka yang pernah mengecap pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Demikian pula yang merumuskan dasar-dasar negara adalah mereka yang pernah mendapat pendidikan dengan sistem Belanda, baik yang ada di Indonesia atau di negeri Belanda. Perumus "Piagam Jakarta", yang merupakan cikal bakal dasar negara Republik Indonesia, yang berjumlah sembilan orang hanya seorang lulusan pesantren yaitu K.H. Abdul Wahid Hasyim, sedangkan yang lainnya Soekarno, M. Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Agus salim, Achmad Subardjo, M. Yamin, merupakan lulusan sekolah Belanda. Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

⁹ Mark Juergensmeyer, *Menentang Negara Sekuler: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 24.

¹⁰ Mark Juergensmeyer, *Menentang Negara Sekuler*

¹¹ Lihat analisa R. William Liddle, "Skripturalisme Media Dakwah: Pemikiran dan Aksi Politik Orde Baru", *Umum Qur'an*, No. 3 vol. IV, tahun 1993, h. 53-65.

¹² Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 21

¹³ Issa J. Boulata, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 142

¹⁴ Sindhunata, "Dilema Globalisasi", *Basis*, No. 01-02, Januari-Februari 2003, h. 5

¹⁵ Karen Armstrong, *Berperang demi Tuhan*, p. xvi-xvii

¹⁶ Gilles Kipel, *The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World*, (The Pennsylvania State University Press, 1993), h. 191.

¹⁷ Mengenai pencarian para sarjana muslim kontemporer dalam merumuskan suatu identitas keislaman di dunia modern yang terus lihat Robert D Lee, *Mencari Islam Autentik: Sari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun*, (Bandung: Mizan, 2000).

¹⁸ Lihat Fadwa El-Gundi, *Jilbab: antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi, 2003).

¹⁹ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Root of a Modern Debate*, (New Haven: CT. Yale University Press, 1992).

²⁰ Lihat Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, h. 141-145

²¹ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, h. 157.

²² Francois Houtart "Kultus Kekerasan atas Nama Agama: Suatu Panorama" dalam Thomas Santoso (ed.), *Kekerasan Agama tanpa Agama*, (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002), h. 12.

²³ Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, (Solo: Jazera, 2004), h.115

²⁴ Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana*, (Bandung: Mizan, 2002)

²⁵ Mark Juergensmeyer, *Teror atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, (Jakarta: Nizam Press, 2002), h. 248.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam: Historical Root of a Modern Debate*, New Haven: CT. Yale University Press, 1992.

Amstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Jakarta: Serambi, 2001.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

El-Gundi, Fadwa, *Jilbab: antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi, 2003.

Houtart, Francois, "Kultus Kekerasan atas Nama Agama: Suatu Panorama" dalam Thomas Santoso, *Kekerasan Agama tanpa Agama*, Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002

Ismail, Faisal, *Islam dan Pancasila: Indonesia Politics 1945-1995*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2001.

-
- Jamhari dan Jajang Jahroni (eds.), *Gerakan Salafi Radikal di Indoensia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Juergensmeyer, Mark, *Teror atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, Jakarta: Nizam Press, 2002
- Juergensmeyer, Mark, *Menentang Negara Sekuler: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*, Bandung: Mizan, 1998
- Kimball, Charles, *Kala Agama Jadi Bencana*, Bandung: Mizan, 2002
- Kipel, Gilles, *The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World*, The Pennsylvania State University Press, 1993
- Lee, Robert D., *Mencari Islam Autentik: Sari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun*, Bandung: Mizan, 2000
- Liddle, R. William, "Skripturalisme Media Dakwah: Pemikiran dan Aksi Politik Orde Baru", *Ulumul Qur'an*, No. 3 vol. IV, tahun 1993
- Madjid, Nurcholish, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Norris, Pippa dan Inglehart, Ronald, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*, Cambridge University Press, 2004
- "Pengusung Syariah di Jalur Tengah" *Gatra: Edisi Khusus*, No. 1-2 tahun XI, 27 November 2005, 120.
- Samudra, Imam, *Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazera, 2004
- Sindhunata, "Dilema Globalisasi", *Basis*, No. 01-02, Januari-Februari 2003